



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019

Jl. Ahmad Yani No. 252

---Pontianak--Kalimantan Barat 78124

Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173

e-mail : pta.pontianak@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretaris



NAFFI, S.Ag., M.H.

NIP. 19701201 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang	15
B.4 Belanja Modal.....	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	16
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	17
B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	20
C.3 Piutang Bukan Pajak	21
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	21
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	22
(TGR).....	22
C.7 Persediaan.....	22
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	23
C.9 Tanah.....	23
C.10 Peralatan dan Mesin	25
C.11 Gedung dan Bangunan	25
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C.13 Aset Tetap Lainnya.....	26
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	27
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	27
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	28
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	28
C.18 Aset Tak Berwujud	29
C.19 Aset Lain–Lain	29
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	30
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga.....	30
C.22 Pendapatan Diterima di Muka	30
C.23 Uang Muka dari KPPN	31
C.24 Ekuitas	31
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	32
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	32

D.2 Beban Pegawai	32
D.3 Beban Persediaan	33
D.4 Beban Barang dan Jasa	33
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6 Beban Perjalanan Dinas	34
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	35
D.9 Defisit dari Kegiatan Non Operasional	35
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	37
E.1 Ekuitas Awal	37
E.2 Defisit LO.....	37
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	37
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	37
E.5 Koreksi Lain-lain	37
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	37
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	38
E.7 Ekuitas Akhir	38
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	39
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	39
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	39
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	39

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2018</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan TGR per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TGR per 30 Juni 2019</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 18. Rincian Persediaan</i>	<i><u>23</u></i>
<i>Tabel 19. Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2019</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018... </i>	<i>35</i>
<i>Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018</i>	<i>36</i>

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Jl.AHMAD YANI No. 252 PONTIANAK - Kalimantan Barat 78124

Telp. 0561 - 736157 Fax. 0561 - 712173 e-mail : pta.pontianak@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Semester I Tahun 2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretaris,



MAFFI, S.Ag., M.H.

NIP. 19701201 199903 1 004

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Semester I Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.301.740,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp18.150.000,00 atau mencapai 68 persen.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp5.204.705.511,00 atau mencapai 53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.782.925.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp56.511.474.513,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp61.643.500,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp56.447.306.013,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.525.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp56.451.474.513,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp12.301.740,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.386.488.839,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.374.187.099,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp65.000,00 dan Rp5.374.122.099,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp5.374.122.099,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp57.380.145.141,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp5.374.122.099,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.445.451.471,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp56.451.474.513.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30 JUNI 2019 DAN 30 JUNI 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2019			TA 2018		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	18,150,000.00	12,301,740.00	67.78	18,150,000.00	12,310,830.00	67.83
Jumlah Pendapatan		18,150,000.00	12,301,740.00	67.78	18,150,000.00	12,310,830.00	67.83
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	7,485,350,000.00	4,579,829,011.00	61.18	8,199,617,000.00	3,923,892,630.00	47.85
2. Belanja Barang	B.3	2,242,075,000.00	624,876,500.00	27.87	1,317,125,000.00	492,916,248.00	37.42
3. Belanja Modal	B.4	55,500,000.00	-	-	932,500,000.00	-	-
Jumlah Belanja		9,782,925,000.00	5,204,705,511.00	53.20	10,449,242,000.00	4,416,808,878.00	42.27

NERACA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2019	31 DESEMBER 2018
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	60,000,000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid	C. 2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto		-	-
Persediaan	C. 7	1,643,500	1,672,000
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8	-	-
Jumlah Aset Lancar		61,643,500	1,672,000
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	49,445,078,000	49,445,078,000
Peralatan dan Mesin	C. 10	3,858,716,840	4,999,200,142
Gedung dan Bangunan	C. 11	6,994,550,000	6,994,550,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 12	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 13	16,025,520	16,025,520
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15	(3,867,064,347)	(4,068,640,804)
Jumlah Aset Tetap		56,447,306,013	57,386,212,858
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18	5,000,000	5,000,000
Aset Lain-Lain	C. 19	213,711,302	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	(216,186,302)	(2,500,000)
Jumlah Aset Lainnya		2,525,000	2,500,000
JUMLAH ASET		56,511,474,513	57,390,384,858
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21	-	10,239,717
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 22	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 23	60,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		60,000,000	10,239,717
JUMLAH KEWAJIBAN		60,000,000	10,239,717
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	56,451,474,513	57,380,145,141
JUMLAH EKUITAS		56,451,474,513	57,380,145,141
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		56,511,474,513	57,390,384,858

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL 30 JUNI 2019 DAN 2018

URAIAN	CATATAN	TA 2019	TA 2018
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		12,301,740	12,310,830
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	12,301,740	12,310,830
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	4,579,829,011	3,902,148,070
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	17,500,500	33,535,650
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	256,615,872	213,277,192
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	224,463,843	147,597,225
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	116,150,068	90,689,748
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	191,929,545	193,963,140
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		5,386,488,839	4,581,211,025
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,374,187,099)	(4,568,900,195)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		558,000	142,500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		493,000	178,500
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		65,000	(36,000)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	65,000	(36,000)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(5,374,122,099)	(4,568,936,195)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2019 DAN 2018

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2019	30 JUNI 2018
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	57.380.145.141,00	56.777.776.610
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(5.374.122.099,00)	(4.568.936.195)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	4.445.451.471,00	4.407.123.048
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(928.670.628,00)	(161.813.147)
EKUITAS AKHIR	E. 7	56.451.474.513,00	56.615.963.463

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Tinggi Agama
Pontianak*

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mewujudkan :

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien

- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, dan persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
- b. Peningkatan akseptibilitas putusan hakim dengan indikator kinerja berupa persentase penurunan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali,
- c. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja antara lain persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis, serta ratio majelis hakim terhadap perkara
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan indikator kinerja antara lain persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti,
- e. Peningkatan kualitas SDM dengan indikator kinerja antara lain persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

Basis Akrua

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

(6) Kewajiban

Akuntansi

atas

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Adapun revisi tersebut adalah revisi dari pusat dimana terdapat penambahan pagu belanja barang dan modal untuk mendukung E-Court. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2019	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	18.150.000	18.150.000
Jumlah Pendapatan	18.150.000	18.150.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.485.350.000	7.485.350.000
Belanja Barang	1.333.325.000	2.242.075.000
Belanja Modal	25.000.000	55.500.000
Jumlah Belanja	8.843.675.000	9.782.925.000

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan

Rp12.301.740,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp12.301.740,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.150.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2019		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	18,150,000.00	12,301,740.00	67.78
Jumlah Pendapatan Bruto		18,150,000.00	12,301,740.00	67.78
Pengembalian		-	-	0.00
Jumlah Pendapatan Netto		18,150,000.00	12,301,740.00	67.78

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.090,00 atau 0,07 persen dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2018. Penurunan ini tidaklah signifikan, adapun penyebab penurunan tersebut antara lain:

1. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan realisasi pada tahun 2019 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 18,78 persen.
2. Terdapat penurunan yang sangat signifikan pada penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dikarenakan adanya aturan baru dimana persekot gaji hanya bisa diangsur sebanyak 5 kali angsuran bukan lagi 20 kali angsuran. Hal ini tentu saja menyebabkan turunnya minat pegawai yang mutasi untuk mengajukan persekot.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,301,740.00	10,356,390.00	1,945,350.00	18.78
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	1,954,440.00	(1,954,440.00)	(100.00)
Jumlah Pendapatan Netto		12,301,740.00	12,310,830.00	(9,090.00)	(0.07)

Belanja

Realisasi

Belanja

Negara

Rp5.204.705.511,0

0

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada periode 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp5.204.705.511,00 atau 53,20% dari anggaran belanja sebesar Rp9.782.925.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	7,485,350,000.00	4,581,351,675.00	61.20
52	Belanja Barang	2,242,075,000.00	624,876,500.00	27.87
53	Belanja Modal	55,500,000.00	-	0.00
Jumlah Belanja Bruto		9,782,925,000.00	5,206,228,175.00	53.22
Pengembalian Belanja		-	(1,522,664.00)	0.00
Jumlah Belanja Netto		9,782,925,000.00	5,204,705,511.00	53.20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp787.896.633,00 atau sebesar 17,84% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan belanja pegawai dan barang pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Rincian penyebab kenaikan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	4,579,829,011.00	3,923,892,630.00	655,936,381.00	16.72
52	Belanja Barang	624,876,500.00	492,916,248.00	131,960,252.00	26.77
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		5,204,705,511.00	4,416,808,878.00	787,896,633.00	17.84

Belanja
Pegawai
Rp4.579.829.011,0
0

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.579.829.011,00 dan Rp3.923.892.630,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp655.936.381,00 atau 16,72% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2018. Kenaikan ini disebabkan antara lain :

- Adanya kenaikan gaji PNS sebesar 5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang ditanda tangani tanggal 13 Maret 2019 dan dibayarkan rapelan kenaikannya mulai Januari 2019.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.225.884.000,00	1.078.663.900,00	147.220.100,00	13,65
Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.614,00	15.244,00	2.370,00	15,55
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111.329.800,00	98.103.620,00	13.226.180,00	13,48
Belanja Tunj. Anak PNS	31.781.384,00	29.642.680,00	2.138.704,00	7,21
Belanja Tunj. Struktural PNS	46.935.000,00	46.935.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.387.580.000,00	1.966.950.000,00	420.630.000,00	21,38
Belanja Tunj. PPh PNS	486.083.457,00	395.483.686,00	90.599.771,00	22,91
Belanja Tunj. Beras PNS	58.008.420,00	57.718.740,00	289.680,00	0,50
Belanja Uang Makan PNS	139.562.000,00	164.965.000,00	(25.403.000,00)	(15,40)
Belanja Tunjangan Umum PNS	15.870.000,00	20.615.000,00	(4.745.000,00)	(23,02)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	78.300.000,00	64.800.000,00	13.500.000,00	20,83
Realisasi Belanja Bruto	4.581.351.675,00	3.923.892.870,00	657.458.805,00	16,76
Pengembalian	(1.522.664,00)	(240,00)	(1.522.424,00)	634.343,33
Realisasi Belanja Netto	4.579.829.011,00	3.923.892.630,00	655.936.381,00	16,72

Belanja
Barang
Rp623.353.836,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp623.353.836,00 dan Rp492.916.008,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp130.437.828,00 atau 26,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2018. Kenaikan ini diakibatkan kenaikan pada belanja operasional dan belanja perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	212.188.270,00	169.491.867,00	42.696.403,00	25,19
Belanja Barang Non Operasional		11.591.000,00	(11.591.000,00)	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	17.407.000,00	31.465.200,00	(14.058.200,00)	100,00
Belanja Jasa	54.667.319,00	42.582.208,00	12.085.111,00	28,38
Belanja Pemeliharaan	224.463.843,00	147.096.225,00	77.367.618,00	52,60
Belanja Perjalanan Dinas	116.150.068,00	90.689.748,00	25.460.320,00	28,07
Realisasi Belanja Bruto	624.876.500,00	492.916.248,00	131.960.252,00	26,77
Pengembalian	(1.522.664,00)	(240,00)	(1.522.424,00)	100,00
Realisasi Belanja Netto	623.353.836,00	492.916.008,00	130.437.828,00	26,46

Belanja

Modal Rp0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019 sama dengan realisasinya pada periode 30 Juni 2018. Belanja Modal untuk TA 2019 ini belum terealisasi dikarenakan menunggu petunjuk dari pusat mengenai spesifikasi.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sama dengan periode 30 Juni 2018. Belanja modal peralatan dan mesin

belum terealisasi dikarenakan masih menunggu petunjuk mengenai spesifikasi produk dari pusat.

Untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin memang mengalami keterlambatan (tidak sesuai dengan perencanaan). Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk mengenai spesifikasi produk dari pusat.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2019 dan TA 2018*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2019	60.000.000,00	0,00
	Jumlah	60.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp 20.917.421,00
2	Di Kas Bendahara	Rp 39.082.579,00
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp 60.000.000,00
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	Pengembalian LS Remun	Rp -
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 60.000.000,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

*Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00*

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1.	-	-	1,954,440.00
JUMLAH		-	1,954,440.00

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Nihil			
JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar

Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1.	Nihil		
JUMLAH		-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan Rp1.643.500,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.643.500,00 dan Rp1.672.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp28.500,00 atau 1,70%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018	Mutasi	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	1,672,000.00	(28,500.00)	1,643,500.00
Jumlah		1,672,000.00	(28,500.00)	1,643,500.00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : W14-A/1040/OT.01.1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019. Seluruh persediaan dalam kondisi baik.

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Persediaan yang belum diregister (Rp0,00)

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Pontianak per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.445.078.000,00 dan Rp49.445.078.000,00.

Tanah Rp49.445.078.000,00

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	49,445,078,000.00
Mutasi tambah:	0.00
- Koreksi Penilaian Kembali	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Jumlah Mutasi	0.00
Saldo per 30 Juni 2019	49,445,078,000.00

Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2019

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Sertifikat Hak Pakai No. 03 Tahun 2008	Jl. Ahmad Yani No. 252 Pontianak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	2.375	39.897.720.000,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	Sertifikat Hak Pakai No. 29 Berubahn No. 3 Th 2008	Jl. Abdurraman Saleh Gg. Panorama Pontianak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	673	1.803.656.000,00
	2	Sertifikat Hak Pakai No. 16 Tgl. 12/05/2003	Jl. Budi karya Pontianak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	447	2.459.772.000,00
	3	Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2008	Jl. Abdurraman Saleh Gg. Panorama Pontianak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.994	5.092.752.000,00
	4	Sertifikat Hak Pakai No. 00001 tgl 02 Agustus 2013	Jl. S. Raya Dalam Komp. Srikandi I No. A/62 Pontianak	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	156	191.178.000,00
Jumlah Halaman I					5.645	49.445.078.000,00

Peralatan dan
Mesin
Rp3.858.716.84
0,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp3.858.716.840,00 dan Rp4.999.200.142,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.140.483.302,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	4.999.200.142
Pembelian	-
Hibah Langsung	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	(746.952.300)
Jumlah Mutasi Kurang	(746.952.300)
Jumlah Mutasi	746.952.300
Saldo per 30 Juni 2019	4.999.200.142
Akumulasi Penyusutan	(3.432.489.963)

Mutasi kurang yang terjadi pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berasal dari transfer keluar antara lain :

- Transfer keluar ke Pengadilan Agama Bengkayang dengan Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor W14-A/377/PL.07/II/2019 senilai Rp153.634.000,00.
- Transfer keluar ke Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor W14-A/378/PL.07/II/2019 senilai Rp292.614.000,00.
- Transfer keluar ke Pengadilan Agama Singkawang dengan Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor W14-A/379/PL.07/II/2019 senilai Rp115.460.000,00.
- Transfer keluar ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor W14-A/380/PL.07/II/2019 senilai Rp281.904.000,00.
- Transfer keluar ke Pengadilan Agama Mempawah dengan Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor W14-A/481/PL.06/III/2019 senilai Rp88.000.000,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp6.994.550.00
0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp6.994.550.000,00 dan Rp6.994.550.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	6.994.550.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	6.994.550.000,00
Akumulasi Penyusutan	(434.574.384,00)
Nilai Buku	6.559.975.616,00

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Tetap
Lainnya
Rp16.025.520,0
0

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp16.025.520,00 dan Rp16.025.520,00, terdapat kenaikan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	16,025,520.00
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	16,025,520.00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	16,025,520.00

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.867.064.347,00

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp3.867.064.347,00 dan Rp4.068.640.804,00, terjadi kenaikan sebesar Rp490.171.945,00 atau 13,69%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.858.716.840	(3.432.489.963)	426.226.877
2	Gedung dan Bangunan	6.994.550.000	(434.574.384)	6.559.975.616
3	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	16.025.520	-	16.025.520
Jumlah		10.869.292.360	(3.867.064.347)	7.002.228.013

Piutang Tagihan
TP/TGR Rp0,00

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1.	Nihil		
JUMLAH		-	-

Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih -

Tagihan TP/TGR

Rp0,00

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	Nihil				
Total			-	-	-

Aset Tak

C.18 Aset Tak Berwujud

Berwujud

Rp5.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp5.000.000,00 dan Rp5.000.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berupa *software anti virus* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	5.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2019	5.000.000,00
Akumulasi Amortisasi	(3.125.000,00)
Nilai Buku	1.875.000,00

Aset Lain-Lain

C.19 Aset Lain-Lain

Rp213.711.302,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp213.711.302,00 dan Rp0,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Tinggi Agama Pontianak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
Rp216.186.302,
00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp216.186.302,00 dan Rp2.500.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp213.686.302 atau 8.547,45%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	5.000.000,00	(3.125.000,00)	1.875.000,00
2	Aset Lain-Lain	213.711.302,00	(213.061.302,00)	650.000,00
Jumlah		218.711.302,00	(216.186.302,00)	2.525.000,00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp10.239.717,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
		Nihil	
		-	

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN Rp0,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

Ekuitas
Rp56.451.474.5
13,00

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp56.451.474.513,00 dan Rp57.380.145.141,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNPB
Rp12.301.740,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp12.301.740,00 dan Rp12.310.830,00.

Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	12.301.740,00	10.356.390,00	18,78
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		12.301.740,00	10.356.390,00	18,78
Pendapatan Lain-Lain				
1	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	1.954.440,00	(100,00)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	1.954.440,00	(100,00)
Total		12.301.740,00	12.310.830,00	(0,07)

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari sewa tanah gedung dan bangunan berupa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Panitera berjumlah 7 unit.

Beban Pegawai

Rp4.579.829.011,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.579.829.011,00 dan Rp3.902.148.070,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.225.884.000,00	1.080.378.292,00	13,47
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.950,00	15.036,00	(0,57)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	111.329.800,00	98.275.060,00	13,28
4	Beban Tunj. Anak PNS	31.781.384,00	29.711.256,00	6,97
5	Beban Tunj. Struktural PNS	46.935.000,00	46.935.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	2.387.110.000,00	1.966.950.000,00	21,36
7	Beban Tunj. PPh PNS	486.083.457,00	395.483.686,00	22,91
8	Beban Tunj. Beras PNS	58.008.420,00	57.718.740,00	0,50
9	Beban Uang Makan PNS	139.562.000,00	141.266.000,00	(1,21)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	15.870.000,00	20.615.000,00	(23,02)
11	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	77.250.000,00	64.800.000,00	19,21
Total		4.579.829.011,00	3.902.148.070,00	17,37

Beban Persediaan

Rp17.500.500,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.500.500,00 dan Rp33.535.650,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	17.500.500,00	33.535.650,00	(47,82)
Total		17.500.500,00	33.535.650,00	(47,82)

Beban Barang dan

Jasa

Rp256.615.872,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp256.615.872,00 dan Rp213.277.192,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	117.163.750,00	110.680.767,00	5,86
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.078.520,00	3.263.100,00	55,63
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25.650.000,00	27.625.000,00	(7,15)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	62.097.500,00	26.100.000,00	137,92
5	Beban Bahan	0,00	11.591.000,00	(100,00)
8	Beban Langganan Listrik	43.761.140,00	31.935.042,00	37,03
9	Beban Langganan Telepon	1.231.762,00	1.100.883,00	11,89
10	Beban Langganan Air	1.633.200,00	981.400,00	66,42
Total		256.615.872,00	213.277.192,00	20,32

D.5. Beban Pemeliharaan*Beban**Pemeliharaan**Rp224.463.843,00*

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp224.463.843,00 dan Rp147.597.225,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.195.500,00	56.318.000,00	(16,20)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	23.000.000,00	10.000.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	154.268.343,00	80.778.225,00	90,98
Total		224.463.843,00	147.096.225,00	52,60

D.6 Beban Perjalanan Dinas*Beban Perjalanan**Dinas**Rp116.150.068,00*

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp116.150.068,00 dan Rp90.689.748,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	111.650.068,00	88.039.748,00	26,82
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.500.000,00	2.650.000,00	69,81
Total		116.150.068,00	90.689.748,00	28,07

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp191.929.545,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp191.929.545,00 dan Rp193.963.140,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103.748.244,00	106.737.369,00	(2,80)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.906.301,00	86.600.771,00	0,35
Jumlah Penyusutan		190.654.545,00	193.338.140,00	(1,39)
1	Beban Amortisasi Software	625.000,00	625.000,00	-
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	650.000,00	0,00	-
Jumlah Amortisasi		1.275.000,00	625.000,00	104,00
Total		191.929.545,00	193.963.140,00	(1,05)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp65.000,00

D.9 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

0

Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	558.000,00	142.500,00	291,58
2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(493.000,00)	(178.500,00)	176,19
Total		65.000,00	(36.000,00)	(280,56)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal**Rp57.380.145.141,00***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp57.380.145.141,00 dan Rp56.777.776.610,00.

*Defisit LO**Rp9.615.695.709,00***E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah defisit sebesar Rp5.374.122.099,00 dan Rp4.568.936.195,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Selisih Revaluasi**Aset Tetap Rp0,00***E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset**Tetap Non Revaluasi Rp0,00***E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi lain-lain**(Rp0,00)***E.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Transaksi Antar**Entitas Rp4.445.451.471,00***E.6 Transaksi Antar Entitas**

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.445.451.471,00 dan Rp4.407.123.048,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.204.705.511,00
Diterima dari Entitas Lain	(12.301.740,00)
Transfer Keluar	(746.952.300,00)
Pengesahan Hibah Langsung	-
	4.445.451.471,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp12.301.740,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.204.705.511,00.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp56.451.474.513,
00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp56.451.474.513,00 dan Rp56.615.963.463,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2019 pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2019.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas revaluasi BMN yang menuntut penyelesaian berupa koreksi nilai revaluasi BMN pada tahun 2018. Ada terdapat tiga temuan, dua diantaranya terhadap rumah dinas ketua dan wakil ketua. Temuan ini telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2018. Temuan yang masih menunggu tindak lanjut berupa penilaian kembali adalah gedung pos jaga permanen. Namun pada tahun 2019 ini dilakukan Re-revaluasi oleh KPKNL terhadap seluruh aset tanpa terkecuali. Hingga saat ini hasil Re-revaluasi tersebut masih belum keluar.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
 - a. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-000772-30-7 atas nama BPG 042 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang digunakan sebagai penampung DIPA Badan Urusan Administrasi dengan saldo akhir per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0. Rekening dibuka untuk keperluan menampung uang belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - b. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001288-30-1 atas nama BPG 042 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang digunakan sebagai penampung DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan saldo akhir per 30 Juni 2019 sebesar Rp.0. Rekening dibuka untuk keperluan menampung uang belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - c. BRI Cabang Pontianak A/C 0071-01-001831-30-8 atas nama RPL 042 PTA Pontianak Untuk Biaya Perkara yang digunakan sebagai penampung biaya perkara/titipan pihak ke-3 dengan saldo akhir per 30 Juni 2019 sebesar Rp.150.000.

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun Anggaran 2018 bernomor : DIPA-005.01-2.402650/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp9.782.925.000,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun revisi DIPA selama 2019 sebagai berikut :

1. Revisi 1 pada tanggal 29 Mei 2019 berupa penambahan pagu belanja barang dan belanja modal. Penambahan pagu belanja barang berupa belanja sewa mesin fotokopi untuk Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat serta belanja langganan daya dan jasa (internet). Sedangkan untuk penambahan pagu belanja modal berupa pengadaan laptop Hakim dan LCD.
2. Revisi 2 pada tanggal 27 Juni 2019 berupa revisi halaman III DIPA. Tidak terdapat pergeseran ataupun perubahan pada pagu.

3. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : W14-A/1899/KP.07.6/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun Anggaran 2019 telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	: Naffi, S.Ag., M.H.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Abd. Muttalib, S.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Jumadi, S.HI.
Bendahara Pengeluaran	: Alvino Dwi Rahman Prabowo, S.Kom.
Pejabat Pembuat Daftar Gaji	: Hesti Yanuarti, S.T.
Staf Pengelola Keuangan	: Rachmanita, S.T.
Staf Pengelola Keuangan	: Rika Darmika, S.E.

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TA. 2019

KODE	URAIAN	M M	KUANTI TAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2018	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2019	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2019
132111	PERALATAN DAN MESIN		964	4.999.200.142	3.404.918.908	316.053.813	0	3.720.972.721	1.278.227
3.01.03	ALAT BANTU	7	4	241.935.000	105.671.428	17.107.857	-34.815.000	87.964.285	153.970
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	16	1.263.482.312	1.323.063.938	14.209.187	-88.000.000	1.249.273.125	14.209
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	0	0	2.530.000	0	-2.530.000	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	132	445.693.250	429.315.450	9.641.200	-43.419.500	395.537.150	50.156
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	517	1.213.093.028	1.149.747.228	30.105.000	-60.093.200	1.119.759.028	93.334
3.06.01	ALAT STUDIO	5	3	10.765.000	11.315.000	0	-550.000	10.765.000	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	9	32.239.000	37.574.000	470.000	-8.625.000	29.419.000	2.820
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	1	3.960.000	19.730.000	0	-15.770.000	3.960.000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	50	531.411.250	523.912.802	21.016.875	-94.729.052	450.200.625	81.210
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	25	115.978.000	117.952.875	11.198.125	-43.699.250	85.451.750	30.526
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA		1	160.000	160.000	0	0	160.000	0
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		9	6.994.550.000	347.668.083	86.906.301	0	434.574.384	6.559.975
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	2	5.042.266.000	245.503.014	59.222.847	0	304.725.861	4.737.540
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	7	1.952.284.000	102.165.069	27.683.454	0	129.848.523	1.822.435
162151	SOFTWARE		1	5.000.000	2.500.000	625.000	0	3.125.000	1.875.000

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK SEMESTER I TAHUN 2019

8.01.01	ASET TAK BERWUJUD		1	5.000.000	2.500.000	625.000	0	3.125.000	1.875.000
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		47	213.711.302	0	650.000	212.411.302	213.061.302	650
3.01.03	ALAT BANTU		1	34.815.000	0	0	34.815.000	34.815.000	0
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN		1	2.530.000	0	0	2.530.000	2.530.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR		7	29.273.000	0	0	29.273.000	29.273.000	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		12	22.132.500	0	0	22.132.500	22.132.500	0
3.06.01	ALAT STUDIO		1	550.000	0	0	550.000	550.000	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI		2	8.625.000	0	0	8.625.000	8.625.000	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR		4	17.070.000	0	650.000	15.770.000	16.420.000	650
3.10.01	KOMPUTER UNIT		6	73.054.052	0	0	73.054.052	73.054.052	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		13	25.661.750	0	0	25.661.750	25.661.750	0
	TOTAL			11.071.978.142	4.071.140.804	191.929.545	-179.819.700	4.080.125.649	8.861.852

LAMPIRAN A.2**HIBAH**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG
PER 30 JUNI 2019**

No	Nama Pemberi	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	